



BUPATI MALANG



WAKIL BUPATI MALANG

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2012**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua

Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Malang yang saya hormati dan saya cintai Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2012; bersama ini disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012. Yang merupakan perwujudan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Masyarakat.

• **PENDAHULUAN**

Kabupaten Malang sebagai bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965.

Dalam perjalanan waktu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang, menetapkan bahwa Ibukota Kabupaten Malang yang semula berpusat di Kota Malang dipindahkan ke Wilayah Kecamatan Kepanjen yang sekaligus menjadi Ibukota Kabupaten Malang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011, sekaligus sebagai arahan rencana pembangunan Tahun 2010-2015 yang dalam implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tiap tahunnya.

Penetapan RPJMD ini sebagai bentuk konsekuensi atas perodesasi kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang periode 2010-2015 sesuai dengan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010. Atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimaksud, setiap akhir tahun Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal ini sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada dasarnya merupakan *progress report* dan evaluasi atas kinerja pembangunan selama satu tahun, oleh karena itu yang menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2012 adalah RKPD Tahun 2012 yang sekaligus sebagai bentuk penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang di tahun

mendatang, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya-upaya pencapaian visi Kabupaten Malang, yaitu : Terwujudnya Kabupaten Malang yang “**Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEB)**”.

- **KONDISI UMUM DAERAH**

- **Geografis**

Wilayah Kabupaten Malang secara geografis terletak antara 112^o17'10,90” – 112^o57'00,00” Bujur Timur dan 7^o44'55,11” – 8^o26'35,45” Lintang Selatan dengan luas wilayah 353.486 ha merupakan Kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang di bagian Utara, Kabupaten Lumajang di bagian Timur, Samudera Indonesia di bagian Selatan dan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di Bagian Barat, sedangkan di bagian tengah berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu.

Kabupaten Malang sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.185 Rukun Warga, 14.667 Rukun Tetangga, dengan jumlah penduduk sebesar 2.459.982 jiwa merupakan salah satu Satuan Wilayah Pengembangan VI di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat perkembangan relatif pesat, baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan dan jasa serta pertambangan dan industri.

- **Topografi**

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan

Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Dengan kondisi topografi tersebut, maka wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi sebagai kawasan lindung khususnya bagi kawasan yang ada dibawahnya. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik.

- **UNGGULAN DAERAH**

- **Pertanian**

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang sangat beraneka-ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayuran, daerah yang potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang dimana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota Malang. Hortikultura unggulan yang memiliki ciri khas Kabupaten Malang adalah apel dan klengkeng di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Jabung. Sedangkan yang masih dalam taraf pengembangan adalah perkebunan apel di Kecamatan Pujon, salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di Wilayah Pengembangan Dampit (seluruh kecamatan) berupa cengkeh dan tebu. Dari komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang pengembangan industri pengolahan, pengembangan pasar Mantung di Kecamatan Pujon sebagai sub terminal agribisnis serta penyulingan minyak atsiri di Kecamatan Dampit.

- **Peternakan**

Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar yang dominan keberadaannya dan pengembangannya sesuai di seluruh wilayah kabupaten adalah sapi potong dan kambing. Sedangkan sapi perah pengembangannya sangat sesuai pada daerah

berbukit atau pegunungan dengan suhu yang relatif rendah seperti di Kecamatan Kasembon, Ngantang, Pujon, Tumpang, Poncokusumo, Jabung dan Wajak.

- **Perikanan**

Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangates, Sengguruh, Lahor dan Kaligenteng (masih dalam tahap sosialisasi). Badan-badan air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan pada daerah pantai Sendangbiru karena saat ini di wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi untuk kawasan pantai selatan. Pantai Sendangbiru merupakan pensuplai perikanan laut terbesar untuk daerah Malang dan wilayah Pasuruan. Dengan kondisi tersebut, maka di Sendangbiru sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan. Meskipun sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan, wilayah perairan ini juga harus tetap dijaga kelestariannya.

- **Industri**

Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Singosari, Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau dan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk. Untuk pengembangan industri pada tahun-tahun mendatang harus diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk pemerataan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang sebagai bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan.

- **Pertambangan**

Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan terdapat di Kawasan Malang Selatan. Dari segi geologis dan beberapa studi menyimpulkan bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan memang cukup besar yaitu emas, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentoit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fosfat. Namun demikian potensi tambang yang cukup besar ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang serta tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Adapun kecamatan yang menyimpan potensi tambang dan perlu penelitian lebih lanjut adalah: Kecamatan Donomulyo, Pagak, Gedangan, Dampit, Ampelgading, Kalipare, Bantur, Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo.

- **Pariwisata**

Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kabupaten Malang yang berbasis pada pariwisata, dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata itu sendiri. Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata.

- **EKONOMI**

- **Pertumbuhan Ekonomi**

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) pada tahun 2010 sebesar Rp. 31.390.548.510.000.- meningkat pada Tahun 2011 sebesar Rp. 35.762.497.970.000.- dan pada tahun 2012 mencapai sebesar Rp. 40.714.733.950.000.-. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) akhir tahun 2010 sebesar Rp. 14.578.967.810.000.- meningkat pada akhir tahun 2011 sebesar Rp. 15.662.096.520.000.- dan tahun 2012 mencapai sebesar Rp. 16.827.450.840.000.-. Selanjutnya pendapatan perkapita tahun 2010 sebesar Rp. 12.827.924,11.- meningkat pada tahun 2011 sebesar Rp.14.537.724,90.- dan tahun 2012 sebesar Rp.16.508.581,13.-.

Pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu yang sama yaitu pada akhir tahun 2010 sebesar 6,27% meningkat pada akhir tahun 2011 sebesar 7,17% dan tahun 2012 sebesar 7,44%. Inflasi pada tahun 2011 sebesar 6,05% dan tahun 2012 sebesar 5,96%.

- **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**

Semangat pembangunan Kabupaten Malang yang tercantum dalam sesanti yang telah diciptakan oleh pendahulu Kabupaten Malang yaitu **SATATA GAMA KARTA RAHARJA**. Yang berarti masyarakat adil dan makmur material dan spiritual yang disertai dasar kesucian yang langgeng, oleh karena itu tujuan pembangunan Kabupaten Malang pada setiap periode pemerintahan mengacu pada tujuan luhur tersebut.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2010-2015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:

- **VISI DAN MISI**

- **VISI**

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB”

Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing artinya dalam

rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

- **Mandiri**, yang dimaknai dengan *pertama* : kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik. *Kedua*: Kemandirian Masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat *entrepreneurship* untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa *leadership* dikalangan pemerintahan dan semangat *entrepreneurship* di kalangan masyarakat luas.
- **Agamis**, yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
- **Demokratis**, yang dimaknai dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan; sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana, dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.
- **Produktif**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.

- **Maju**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.
- **Aman**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.
- **Tertib**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
- **Berdaya Saing**, yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor

- Hal ini sejalan dengan pesan filosofi pembangunan dalam sesanti lambang Kabupaten Malang yaitu: Satata Gama Karta Raharja atau terwujudkan Kabupaten Malang yang adil dan makmur materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama atas dasar kesucian yang langgeng (abadi). Dengan kata lain kemakmuran atau kesejahteraan yang ingin diwujudkan bukan hanya kesejahteraan materiil atau lahiriyah semata namun juga sejahtera secara spiritual atau batiniyah. Kesejahteraan yang utuh itu diyakini dapat dicapai dengan mewujudkan kemajuan secara komprehensif dari 8 kunci tersebut di atas.

- **MISI**

Misi merupakan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya.

- Mewujudkan pemerintahan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis.
- Mewujudkan supremasi hukum dan HAM.
- Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai.
- Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur.
- Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
- Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
- Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan melalui 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 2 sekretariat (Setda dan Set DPRD), 19 Dinas, 19 Lembaga Teknis, 33 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 378 Desa yang terpadu bersama sama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Malang.

- **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH**

- **Strategi Pembangunan**

Strategi merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan dimana untuk 5 tahun kedepan diperlukan strategi sebagai berikut:

- **Peningkatan akhlak mulia dan kesholehan sosial**

Strategi diarahkan melalui penguatan lembaga/tokoh agama, sosial budaya dengan memberikan bantuan pembinaan dan pemberdayaan yang sinergi dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah/pemerintah daerah. Dengan penguatan lembaga/tokoh ini diharapkan peran dan fungsi lembaga/tokoh dalam rangka pembinaan umat dan masyarakat pada umumnya dapat lebih optimal, yang pada gilirannya akan terwujud masyarakat Kabupaten Malang yang berakhlak mulia dan berkesholehan sosial sebagai modal dasar pembangunan.

- **Peningkatan kelembagaan SKPD dan profesionalisme aparatur**

Strategi diarahkan melalui penguatan wewenang, tugas pokok dan fungsi SKPD, peningkatan profesionalisme aparatur termasuk peningkatan *leadership*, peningkatan sarana dan prasarana kerja serta penguatan anggaran SKPD. Diharapkan dengan kuatnya SKPD maka akan meningkat pula kemampuan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

- **Peningkatan sistem informasi hukum dan komunikasi publik**

Strategi diarahkan melalui penguatan jejaring informasi hukum dan informasi pembangunan termasuk peningkatan kemampuan masyarakat dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penyuluhan hukum dan deseminasi produk-produk hukum daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

- **Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat**

Strategi diarahkan melalui penguatan pengamanan swakarsa dengan memperkuat peran dan fungsi satuan perlindungan masyarakat, termasuk sosialisasi mitigasi bencana dan kerjasama bidang keamanan antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan.

- **Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur**

Strategi diarahkan melalui pemeliharaan dan pembangunan baru sarana kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan tata ruang serta permukiman dengan mengutamakan infrastruktur yang secara langsung mendukung perekonomian yaitu peningkatan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan industri, lokasi dan paket wisata, serta desa tertinggal dan sentra kemiskinan.

Selain daripada itu dalam rangka mendukung pemanfaatan ruang secara lebih optimal akan ditetapkan ruang terbuka hijau, kawasan industri dan kawasan khusus lainnya.

Berkaitan dengan penyediaan infrastruktur strategis seperti jalan tol Pandaan–Malang, Jalan Lintas Selatan Jawa Timur, Bandar Udara Abd. Saleh, Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendang Biru dalam 5 tahun ke

depan terus akan didorong pembangunannya; khusus untuk transportasi akan dilakukan penataan ulang manajemen transportasi sesuai dengan trend kebutuhan setelah berfungsinya infrastruktur strategis tersebut seperti jalan-jalan sirip dan jalan antar kota kecamatan di wilayah Malang Raya termasuk kawasan-kawasan permukiman dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan wilayah tampungan bagi kota Malang dan kota Batu. Untuk percepatan pembangunan prasarana perdesaan dilakukan kemitraan bersama pemerintahan desa dan masyarakat.

- **Peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia**

Strategi diarahkan melalui penguatan lembaga pendidikan guna kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang murah dan bermutu, penguatan lembaga pelayanan kesehatan untuk kemudahan masyarakat mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau serta penguatan lembaga dan sarana prasarana olah raga dan seni budaya dalam rangka menunjang olah raga prestasi maupun olah raga masyarakat guna menciptakan masyarakat sehat dan produktif.

Selain daripada itu dilakukan pula kemitraan dengan lembaga perguruan tinggi terutama dibidang penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.

- **Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi**

Strategi diarahkan melalui peningkatan produksi komoditas andalan seperti pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa serta mendorong pengembangan produk potensial seperti pertambangan dan pariwisata. Selain itu juga diarahkan melalui peningkatan investasi dan pengembangan produk industri untuk tujuan ekspor.

Dari aspek sumberdaya manusia dilakukan pula peningkatan dan pengembangan semangat *enterpreneurship* terutama pada generasi muda dan angkatan kerja agar mampu menciptakan lapangan kerja lokal. Strategi lainnya ialah mengembangkan produk unggulan 1 desa/kelurahan 1 produk unggulan utama dan 1 kecamatan 1 produk unggulan utama dengan memperkuat basis pasar lokal melalui gerakan “cinta dan bangga mengkonsumsi produk lokal”.

- **Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan**

Strategi diarahkan melalui penataan tata ruang pertambangan, selektif dalam memberikan izin pengelolaan sumberdaya alam yang rentan pencemaran, menata kembali ruang terbuka hijau dan melaksanakan gerakan penghijauan dan penghutan kembali bersama masyarakat.

- **Arah Kebijakan Umum**

Dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana tersebut diatas dirumuskan arah kebijakan umum sebagai berikut:

- Mendorong maju dan berkembangnya keagamaan, lembaga pendidikan keagamaan dan sosial dengan mengajak serta tokoh agama dan budaya dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan mensosialisasikan kepada masyarakat;
- Memperkuat kelembagaan, tugas pokok, fungsi serta norma standar pelayanan SKPD, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melengkapi sarana dan prasarana kerja, meningkatkan diklat aparatur, memberikan penghargaan dan sanksi kepada pejabat dan pegawai secara konsisten;
- Membangun sistem informasi dan komunikasi publik, sosialisasi dan deseminasi produk hukum serta kunjungan ke desa dan dusun terpencil dalam rangka dialog pembangunan
- Mendorong terwujudnya pengamanan swakarsa menggalakkan kembali pos keamanan lingkungan dan kerjasama dengan aparat keamanan membangun sistem keamanan dan ketertiban masyarakat terpadu dan komprehensif dengan mengajak serta tokoh agama, sosial, budaya dan tokoh masyarakat;

- Membangun dan memelihara infrastruktur perhubungan, kebinamargaan, pengairan, keciptakarya/permukiman, energi dengan memprioritaskan untuk kepentingan mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan;
- Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan sekolah kejuruan yang mampu menghasilkan SDM yang memiliki daya saing tinggi, mengembangkan Puskesmas sebagai pusat informasi masyarakat sehat, sekolah dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin;
- Memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan dengan mengarusutamakan peran usaha mikro kecil menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan;
- Mengendalikan arahan perencanaan tata ruang, selektif dalam pemberian ijin industri yang rawan pencemaran, penghutanan/penghijauan lahan kritis dan pembuatan mitigasi bencana untuk antisipasi dini;
- **Prioritas Daerah (Agenda dan Prioritas Pembangunan)**
 Dari rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran dikelompokkan menjadi 4 agenda besar pembangunan yaitu:
 - Mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya, yaitu suatu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
 - Mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang demokratis, yaitu suatu kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan, sedangkan dari sisi masyarakat terwujudnya suatu

kondisi masyarakat yang modern dan majemuk, menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan falsafah Negara Pancasila, ditandai dengan perilaku bijaksana, dan melaksanakan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.

- Mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing, yaitu suatu kondisi pemerintahan dan masyarakat yang semakin mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan kemampuan sendiri dan berdaya saing tinggi yang di tandai dengan semakin berkembangnya jiwa *leadership* dikalangan pemerintahan dan semangat *enterpreneurship* di kalangan masyarakat luas.
- Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yaitu masyarakat yang semakin meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup dan adanya jaminan masa depan yang lebih baik.

Selanjutnya dari agenda tersebut diarahkan menjadi 7 prioritas sebagai fokus pembangunan 5 tahun kedepan yang merupakan permasalahan mendasar dan aktual untuk segera ditangani mulai tahun pertama RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yaitu :

- **Pelayanan kesehatan yang terjangkau;** terutama penyediaan pelayanan bagi masyarakat miskin dan dusun-dusun terpencil.
- **Pendidikan murah dan berkualitas;** terutama pendidikan bagi warga miskin dan dusun-dusun terpencil.
- **Penyediaan infrastruktur yang memadai;** terutama pembangunan baru dan pemantapan jalan/jembatan untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan dusun terpencil.
- **Perluasan kesempatan kerja;** dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi besar, peningkatan ketrampilan kerja dan pengembangan semangat *enterpreneurship* bagi angkatan kerja.
- **Peningkatan produksi dan ketahanan pangan;** dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin ketahanan pangan masyarakat.

- **Kemudahan pelayanan publik;** baik pelayanan administrasi kependudukan dan hak-hak masyarakat lainnya maupun pelayanan perijinan dan informasi peluang usaha kepada dunia usaha.
- **Pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin;** terutama kecukupan energi (listrik perdesaan dan pemanfaatan biogas), air bersih dan kesehatan lingkungan terutama di dusun terpencil dan sentra kemiskinan.

- **URUSAN DESENTRALISASI**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Malang mengatur urusan pemerintahan menjadi kewenangannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi secara lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan yang bersifat wajib adalah urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat. Urusan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang tahun 2012 didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012, yang berisikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2012 dan merupakan rumusan kebijakan

pembangunan daerah sebagai hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya; hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD; aspirasi masyarakat dalam Musrenbang tahunan; perkiraan kemampuan keuangan daerah; dan kebijakan pembangunan tahunan Pemerintah dan Provinsi Jawa Timur.

- **Urusan Wajib**

- Pendidikan

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi 1), Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2). Program Pendidikan Wajar Dikdas 9 tahun, 3). Program Pendidikan Menengah, 4). Program Pendidikan Luar Biasa, 5), Program Pendidikan Non Formal, 6). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan 7). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

- Kesehatan

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi : 1). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, 2). Program Upaya Kesehatan Masyarakat, 3). Program Pengawasan Obat dan Makanan, 4). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, 5). Program Perbaikan Gizi Masyarakat, 6). Program Pengembangan Lingkungan Sehat, 7). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, 8). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, 8). Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya, 9). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.

- Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 4). Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), 5). Program Pengembangan Kinerja Persampahan;

- Pekerjaan Umum

Program pembangunan yang dilaksanakan 1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, 2). Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, 3). Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, 4). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, 5). Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, 6). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, 7). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, 8). Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan, 9). Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum, 10). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, 11). Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, 12). Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya, 13). Program Pengendalian Banjir, 14). Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, 15). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.

- Tata Ruang

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Perencanaan Tata Ruang, 2). Program Pemanfaatan Ruang, 3). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Pengembangan Data/Informasi, 2). Program Kerjasama Pembangunan, 3). Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, 4). Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, 5). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, 6). Program Perencanaan Pembangunan Daerah, 7). Program Perencanaan Sosial Budaya, 8). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, 9). Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, 10). Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

- Perumahan

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi:1). Program Pengembangan Perumahan, 2). Program Lingkungan Sehat Perumahan, 3). Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, 4). Program Pengelolaan Areal Pemakaman, 5). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

- Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, 2). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, 3). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, 4). Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

- Penanaman Modal

Pembangunan urusan penanaman modal diarahkan untuk menarik investasi, dimana ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri mau menanamkan modalnya antara lain: penegakan peraturan di bidang investasi dan pelayanan publik yang baik; adanya stabilitas keamanan yang terjamin; kondisi tenaga kerja yang berkualitas dan mendukung adanya investasi; ketersediaan sarana infrastruktur yang memadai; dan ketersediaan bahan baku kegiatan investasi. Program yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, 2). Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

- Koperasi & Usaha Kecil Menengah

Program yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, 2). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, 3). Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, 4). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk masyarakat menjadi salah satu bentuk kinerja pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pelayanan dimaksud terus ditingkatkan dengan menyiapkan sarana dan prasarana guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kelengkapan alat cetak e-KTP dan akta catatan sipil. Program yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan.

- Ketenagakerjaan

Kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah berkenaan dengan urusan ketenagakerjaan adalah adanya ketersediaannya lapangan pekerjaan bagi pencari kerja yang sering kali tidak mencukupi kebutuhan, sehingga bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan sebagian besar pencari kerja. Program yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Peningkatan Kesempatan Kerja, 2). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

- Ketahanan Pangan

Program yang dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan).

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, 2). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, 3). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, 4). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

- Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Kesehatan Reproduksi Remaja, 2). Program Pelayanan Kontrasepsi, 3). Program Pembinaan Peran

Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, 4). Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak, 5). Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

- Perhubungan

Program yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, 2). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, 3). Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, 4). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, 5). Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, 6). Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

- Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, 2). Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media, 3). Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;

- Pertanahan

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, 2). Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.

- Kesatuan Bangsa dan Politik

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, 2). Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal, 3). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 4). Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, 5), Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

- Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH, 3). Program Pendidikan Kedinasan, 3). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, 4). Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, 5). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 6). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, 7). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, 8). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, 9). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, 10). Program Peningkatan Pelayanan Publik, 11). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, 2). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, 3). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, 4). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, 5). Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.

- Sosial

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi: 1). Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, 2). Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, 3). Program Pembinaan Anak Terlantar, 4). Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma, 5). Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, 6). Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), 7). Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

- Budaya

Program pembangunan yang dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 2). Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

- Statistik

Program pembangunan yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.

- Kearsipan

Program pembangunan yang dilaksanakan meliputi : 1). Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, 2). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, 3). Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, 4). Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

- Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sistem yang berfungsi menyediakan dan menyampaikan informasi yang terdapat dalam koleksi buku, oleh karena itu koleksi perpustakaan harus diatur dan diolah sedemikian rupa, sehingga informasi tersebut dapat disimpan dan ditemukan kembali secara tepat dan cepat. Program pembangunan yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

- **Urusan Pilihan**

- Kelautan dan Perikanan

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan kelautan dan perikanan adalah : 1). Program Pengembangan Budidaya Perikanan, 2). Program Pengembangan Perikanan Tangkap, 3). Program Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, 4). Program Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 5). Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 6). Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

- Pertanian

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan pertanian meliputi : 1). Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, 2). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, 3). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, 4). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan, 5). Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, 6). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, 7). Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, 8). Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, 9). Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, 10). Program Peningkatan Pelayanan.

- Kehutanan

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan kehutanan meliputi : 1). Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, 2). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, 3). Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, 4). Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran Serta Masyarakat, 5). Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan.

- Energi dan SDM

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan energi dan sumber daya mineral meliputi : 1). Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, 2). Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan, 3). Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, 4). Program Pembinaan dan Pengawasan Migas, 5). Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

- Pariwisata

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan pariwisata meliputi : 1). Program Pengembangan Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2). Program Pengembangan Kemitraan, 3). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

- **Industri**

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan perindustrian adalah Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau.

- **Perdagangan**

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan perdagangan meliputi : 1). Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, 2). Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, 3). Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang, 4). Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar, 5). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, 6). Program Resi Gudang.

- **Transmigrasi**

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada urusan transmigrasi adalah Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

- **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Tugas Pembantuan sebagai salah satu azas penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Departemen/Direktorat

Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) atas Beban APBN dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Malang yang melaksanakan tugas-tugas pembantuan pada tahun anggaran 2012 adalah:

- **Badan Pemberdayaan Masyarakat**

Mendapat tugas pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan program: 1) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM); dan 2) Fasilitas Pemberdayaan Adat dan Sosialisasi Budaya Masyarakat.

- **Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang**

Mendapat tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang digunakan untuk melaksanakan : 1). Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada berkelanjutan, 2). Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura.

- **Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Malang**

Mendapat tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp.1.934.589. yang digunakan untuk melaksanakan :1). Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, 2). Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani, dengan kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.

- **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang**

Mendapat tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang digunakan untuk melaksanakan Program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal.

- **Dinas Kesehatan Kabupaten Malang**

Mendapat tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik yang digunakan untuk melaksanakan: 1). Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga, 2). Program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

- **Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen**

Mendapat tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang digunakan untuk melaksanakan Program Pembinaan Upaya Kesehatan/Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan kegiatan : 1). Pengadaan Gedung dan Bangunan Perawatan Kelas III, 2). Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB (APBN-P TA. 2012).

- **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang**

Mendapat tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang digunakan untuk melaksanakan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja.

- **Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang**

Mendapat tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang digunakan untuk melaksanakan Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dengan kegiatan : 1) Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan, 2) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan, 3).

Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan, 4) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya.

- **Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang**

Mendapat tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang digunakan untuk melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman.

- **TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

- **Kerjasama Antar Daerah**

Beberapa pelaksanaan Program Kerjasama Antar Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang;
- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kota Malang dan Kota Batu dengan Pangkalan TNI AU Abdurachman Saleh;
- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Provinsi Jawa Timur;
- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan;
- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan;
- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;
- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan;
- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;

- Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

- **Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

Adapun kerjasama Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pihak Ketiga yang masih berlangsung sampai dengan tahun 2012 antara lain : Yayasan Dana Sejahtera Mandiri; Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur; PT. Kharisma Karangploso; Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Cipta Husada Malang ; PT. Intelegensia Grahatama Malang; Direktorat Pengembangan Penyehatan lingkungan pemukiman Direktorat Jenderal Karya Kementerian Provinsi Jatim; Valor Co. Ltd; Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Surabaya; Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang ; Johns Program For International Education In Gynecology And Obstetrichs (JHPIEGO) ; Universitas Brawijaya Malang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang; Universitas Negeri Malang (UM); Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang ; PT. Pos Indonesia area retel VII Jawa Timur; Balai Ipteknet BPPT; PT. Bank Jatim; Usaid; Letter Of Intens ; PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur; Yayasan Kendedes Malang; Universitas Islam Malang (UNISMA); Politeknik Negeri Malang; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur; PT. Bakrie Telecome, Tbk. ; PT. Natrindo Telepon Seluler (EXIS); PT. Pratama Kinerja Perkasa Malang; PT. Intelegensia Grahatama; Universitas Wisnu Wardana Malang; Universitas Tribuana Tunggadewi Malang.

- **Kerjasama Dengan Lembaga Instansi Vertikal Di Daerah**

Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah pada tahun 2012 melibatkan beberapa SKPD terkait adalah : Bidang Pertahanan, Keamanan, antara lain bekerjasama dengan : 1). Kodim 0818 Malang, 2). Polres Malang, 3). Kementerian Agama; 4). Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang. Bidang Yustisi, SKPD yang terlibat antara

lain : 1) Kejaksaan Negeri Kepanjen, 2). Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 3) Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang. Bidang Moneter dan Fiskal Nasional, SKPD yang terlibat antara lain : 1). Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang. Bidang Agama, SKPD yang terlibat antara lain : 1). Kementerian Agama, 2). Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Malang.

- **Pembinaan Batas Daerah**

Kegiatan Pelaksanaan Pemasangan Patok/Pilar Batas Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang yang diawali Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2006, dalam hal ini secara Teknis Pelaksanaan Pekerjaan pemasangan pilar batas diserahkan/penunjukan langsung kepada Topografi Kodam V Brawijaya Malang berdasarkan surat penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Dari 9 (sembilan) Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Malang, ada 6 (enam) Daerah telah ditanda tangani oleh Ketua Tim PPBD yang berbatasan yaitu:

- Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar;
- Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang;
- Kabupaten Malang dengan Kabupaten Jombang;
- Kabupaten Malang dengan Kabupaten Probolinggo;
- Kabupaten Malang dengan Kota Malang;
- Kabupaten Malang dengan Kota Batu.

Selanjutnya setelah 6 (enam) Daerah yang berbatasan tersebut ditandatangani oleh Ketua Tim PPBD kemudian diajukan Verifikasi ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur (Biro Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur).

Dari 6 (enam) daerah yang telah diverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Biro Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2012 telah terbit 2 (dua) Permendagri yaitu :

- Permendagri Nomor 16 Tahun 2012 antara Kabupaten Malang dengan Kota Batu;
- Permendagri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kabupaten Malang dengan Kota Malang.

Sedangkan dalam proses di Kementerian Dalam Negeri antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Blitar, kemudian masih dalam koordinasi kelengkapan berkas administrasi antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Mojokerto, Kediri dan Pasuruan.

- **Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

Munculnya berbagai bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang secara umum telah dilakukan langkah-langkah strategis secara swadaya antara unsur-unsur Muspika bersama dengan masyarakat setempat dengan mengadakan bantuan sembako dari PMI, BAZ dan Dinas Sosial Kabupaten Malang, membersihkan reruntuhan terhadap rumah korban dan menempatkan karung plastik yang diisi dengan tanah untuk menahan tebing yang longsor serta dilakukan pembangunan-pembangunan jembatan darurat serta diupayakan membangun atau memperbaiki plengsengan yang rusak dan melaksanakan koordinasi dengan Instansi teknis terkait di Kabupaten Malang.

Untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, Pemerintah Kabupaten Malang telah memprogramkan antisipasi bencana dalam kegiatan : 1) Pembentukan satuan-satuan tugas penanganan bencana berbasis masyarakat, 2). Melakukan pembinaan-pembinaan terhadap upaya mitigasi bencana alam bagi masyarakat yang termasuk dalam daerah rawan bencana serta memberikan informasi dan sosialisasi tentang bahaya terjadinya bencana, 3). Melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan untuk meminimalisir terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh pengrusakan dan penggundulan hutan.

Selanjutnya, langkah-langkah yang direncanakan dalam usulan kegiatan pengelolaan bencana alam di Kabupaten Malang disampaikan dalam framework program (*proframe*), meliputi kaitan antara tujuan, hasil antara kegiatan dan

indikator keberhasilan serta evaluasi yang meliputi : Sosialisasi kepada masyarakat umum terkait dengan pengelolaan bencana, Membangun jaringan kerja terkait bencana, Identifikasi stakeholders potensial dalam pengelolaan bencana, Pembentukan *Working Group* tingkat kabupaten, Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana, Sosialisasi peraturan dan mekanisme pengelolaan bencana, Pertemuan masyarakat untuk sosialisasi program dan membangun komitmen, Pelatihan/Bintek Pengurangan resiko bencana dan tanggap darurat kepada masyarakat, Pembentukan SATGAS PB Kecamatan/Desa Masyarakat Peduli Bencana, Masyarakat di lokasi rawan bencana melakukan *risk assessment* dan simulasi, PENA (Pengenalan bencana) pada anak sekolah, Pembentukan Desa Tangguh, Identifikasi pesan-pesan *Disaster Risk Reduction/Emergency Response* (DRR/ER) untuk advokasi oleh Masyarakat, Identifikasi kebutuhan masyarakat untuk mendukung pemerintah dan lembaga internasional, Program tindak lanjut untuk advokasi, Pembentukan jaringan antar masyarakat, pemerintah dan LSM lokal.

- **Pengelolaan Kawasan Khusus**

Kawasan strategis yang dapat dikategorikan sebagai kawasan Khusus di wilayah Kabupaten *Malang* berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang meliputi Sekitar Bandar Udara, Sekitar Kawasan Strategis Hankam, Sekitar Gudang Amunisi dan Kawasan Pelabuhan.

- **Kawasan Sekitar Bandar Udara**

Satu-satunya lapangan udara yang ada di Kabupaten Malang adalah lapangan udara Abdulrachman Saleh di Kecamatan Pakis. Pada saat ini aktivitas di lapangan udara ini diutamakan untuk kepentingan militer dan kepentingan sipil. Namun sejak tahun 2006, Bandar Udara Abdulrachman Saleh juga telah dipergunakan untuk penerbangan sipil yang melayani rute penerbangan komersial Malang-Jakarta, dan pada tahun 2011 juga melayani rute Malang-Bali. Adapun optimasi pemanfaatan ruang dilakukan dengan penetapan

kawasan bebas seluas 3 km dari *run away* dan radius di sekitar bandar udara sejauh 2 km agar bebas dari kawasan terbangun dan permukiman.

- Kawasan Strategis Hankam

Untuk kawasan militer dalam penetapannya di bedakan menjadi 2 (dua), yaitu Komplek Militer dan Areal Latihan Militer. Dalam penerapannya, kawasan di sekitar kompleks militer dilakukan pelarangan penggunaan tanah yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan menimbulkan *multiplier effect*. Adapun wilayah yang terdapat kompleks militer yaitu di Kecamatan Singosari, dan Jabung. Sedangkan pada Kawasan latihan militer terletak di Kecamatan Lawang, Bantur, Gedangan, Pagak, Donomulyo dan Pangkalan Angkatan Laut Sendangbiru.

- Sekitar Gudang Amunisi

Kawasan ini terdapat di Kecamatan Turen dekat PT. Pindad, mengingat kawasan ini sangat rawan maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa disamping kiri-kanan (sekeliling) dengan jari-jari 1,6 km, intensitas kegiatan pada kawasan terbangun dikendalikan dan dibatasi secara ketat.

- Kawasan Pelabuhan

Pelabuhan di Kabupaten Malang direncanakan di Pantai Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan sekaligus sebagai kota nelayan, kondisi ini mengakibatkan peningkatan kegiatan sekitar pelabuhan. Lokasinya yang berdekatan dengan kawasan hutan memerlukan adanya pengendalian atau arahan aktivitas pelabuhan serta pada kawasan sekitarnya agar pengembangannya tidak mengganggu/mengancam, kelestarian hutan maupun suaka alam Pulau Sempu.

Rencana pengembangan pelabuhan di pantai Sendang Biru akan menimbulkan *multiplier effect* di daerah sekitarnya misalnya perkembangan penggunaan tanah untuk kawasan terbangun akan berkembang sangat pesat khususnya untuk prasarana pelabuhan, pemukiman, industri, pengolahan ikan dan lain-lain.

Dari keempat kawasan khusus dimaksud, pengelolaan kawasan tidak secara mutlak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, tetapi dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi pusat dan Provinsi terkait sesuai dengan kewenangan bidang tugasnya. Untuk kawasan militer dan gudang amunisi, pengelolaannya secara mutlak dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan, namun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang tetap terjalin.

- **Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Dalam pelaksanaan penanganan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Malang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selalu berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL), Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal termasuk Kepolisian Resort Malang, Komando Distrik Militer 0818 Kabupaten Malang serta instansi vertikal terkait lainnya.

Penanganan sebagaimana dimaksud, melalui upaya-upaya:

- Upaya Preventif, dengan cara:
 - Melakukan patroli dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah;
 - Memberikan penyuluhan dan pembinaan bila menemukan pelanggaran, serta mengundang pelanggar untuk klarifikasi;
 - Memberikan teguran apabila akan timbul pelanggaran dalam rangka penegakan.
- Upaya Represif
Merupakan tindakan pemberian sanksi kepada pelanggar Peraturan Daerah dengan tujuan untuk memberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Upaya ini meliputi:
 - Tindakan Represif Non Yustisi;
 - Tindakan Represif Pro Yustisi.

- **KESIMPULAN DAN PENUTUP**

Sebagai kesimpulan dari hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Malang tahun 2012 dapat disampaikan sebagai berikut :

Pertama; Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur ; keberhasilannya ditunjukkan dengan: meningkatnya pertumbuhan ekonomi; secara gradual menggeser peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier yang menunjukkan semakin menguatnya struktur perekonomian; semakin meningkatnya pertumbuhan investasi; semakin meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat; semakin meningkatnya jumlah dan mutu jalan/jembatan baik jalan kabupaten maupun jalan desa, irigasi dan fungsi sungai serta sarana dan prasarana permukiman termasuk gedung-gedung pemerintah dan infrastruktur strategis seperti Bandara Abd. Rahman Saleh, Jalan Lintas Selatan, Jalan Lingkar Barat Kota Kepanjen, pelabuhan Perikanan Nusantara Sendang Biru, pusat kegiatan olah raga, Kawasan Agropolitan Poncokusumo dan Minapolitan Wajak.

Kedua; Peningkatan Pelayanan Publik dan Peningkatan Kapasitas Anggaran ; ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan perijinan usaha dan administrasi kependudukan; semakin meningkatnya SKPD yang bersertifikat ISO dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan semakin meningkatnya pelayanan air bersih masyarakat; dan semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan listrik di perdesaan serta semakin berkembangnya program pembangunan yang terbiayai oleh APBD.

Ketiga; Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran serta Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan; ditunjukkan dengan semakin tertanganinya masyarakat miskin dengan berbagai program; meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja yang pada gilirannya mengurangi pengangguran; selain itu tumbuhnya wira usaha baru yang mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi yang cukup signifikan.

Keempat; Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan ; ditunjukkan dengan semakin meningkatnya APK sekolah baik tingkat SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MA; semakin baiknya kualitas kelulusan dan semakin baiknya angka penyelesaian sekolah. Begitu juga keberhasilan di bidang kesehatan diindikasikan dengan semakin tersedianya layanan kesehatan baik rumah sakit, puskesmas maupun posyandu dan semakin meningkatnya angka harapan hidup.

Kelima; Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik serta Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia ; keberhasilannya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kesadaran aparaturnya dan masyarakat terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; semakin berkurangnya angka kriminalitas baik dari segi jumlah maupun kualitas kriminal; semakin baiknya penyelenggaraan pemilihan umum baik kepala daerah dan wakil kepala daerah maupun kepala desa.

Keenam; Peningkatan Kesalehan Sosial Dalam Beragama Dan Sosial Budaya; yang keberhasilannya ditunjukkan dengan tidak terjadinya konflik antar umat beragama, semakin membaiknya pelayanan jamaah haji dan semakin meningkatnya jumlah jamaah haji Kabupaten Malang; semakin meningkatnya kegiatan keagamaan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat; semakin baiknya sarana ibadah; semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan semakin meningkatnya kepedulian terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); semakin meningkatnya kegiatan kesenian dan budaya lokal Malangan.

Ketujuh; Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup ; keberhasilannya diindikasikan dengan semakin meningkatnya kegiatan pertambangan terutama galian C dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan; semakin meningkatnya program penghijauan dan konservasi dan semakin meningkatnya kepatuhan pengusaha terhadap pencemaran lingkungan.

Seiring dengan hal tersebut secara kualitatif telah dicapai beberapa penghargaan dari berbagai bidang seperti: keagamaan, politik dan hukum, pelayanan publik, ekonomi, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup; yang kesemuanya merupakan hasil kerja bersama pemerintah, DPRD, dan masyarakat Kabupaten Malang.

Walaupun demikian perlu kita akui pula bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan atau harapan-harapan masyarakat yang belum dapat kita wujudkan karena keterbatasan kita, terutama terbatasnya jumlah anggaran disatu sisi dan disisi lain luasnya wilayah dengan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana dan besarnya jumlah penduduk dengan berbagai kebutuhan sosial ekonominya;

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kabupaten Malang, sudah dipersiapkan antara lain : 6 Wilayah Pengembangan (WP) yang terdiri dari, WP Lingkar Kota Malang, WP Kepanjen, WP Ngantang, WP Tumpang, WP Sumbermanjing Wetan, dan WP Turen dan Dampit yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan dan pengungkit bagi kecamatan-kecamatan sekitarnya; rencana pembangunan jalan tol Pandaan-Malang; Jalan Lintas Selatan Jawa Timur; jalan alternatif/ sirip JLS; Jalan Lingkar Timur Kabupaten Malang; Jalan Lingkar Barat Kota Kepanjen; Jalan Lingkar Timur Kota Kepanjen; Jalan Lingkar Selatan Kota Kepanjen; Terminal Tipe B Kota Kepanjen; Bandara Abdul Rachman Saleh; Pelabuhan Umum Tamban; Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendang Biru; angkutan masal bus metro dan komuter; Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk hasil kajian tentang pengembangan Taman Vulkania Bromo; Kawasan Minapolitan Wajak; pengembangan kawasan industri; penataan dan pengembangan sarana dan prasarana Kota Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten dan pusat pemerintahan; yang sebagian masih dalam

bentuk hasil studi perencanaan dan sebagian lagi sudah dalam tahap pelaksanaan awal yang kesemuanya perlu dilanjutkan tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Pemerintah Kabupaten Tahun 2012 adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Malang selama Tahun 2012.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diucapkan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf atas kekurangan dan kekhilafan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan harapan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini dapat ditingkatkan lagi dimasa-masa yang akan datang dan semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera

BUPATI MALANG

H. RENDRA KRESNA